

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DI LEMBANG BANGKELEKILA', KECAMATAN
BANGKELEKILA', KABUPATEN TORAJA UTARA**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

Mustika Natsir

E121 13 017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI LEMBANG
BANGKELEKILA' KECAMATAN BANGKELEKILA'
KABUPATEN TORAJA UTARA

Yang diajukan oleh :


MUSTIKA NATSIR

E 121 13 017


Yang telah dipertahankan di depan panitia skripsi
Pada tanggal 29 mei 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP.19641231 198903 1 027

Pembimbing II


A. Murfhi, S.Sos, M.Si
NIP.19720328 200012 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik
dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas


Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas


Dr. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630912 198702 2 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI LEMBANG BANGKELEKILA' KECAMATAN BANGKELEKILA' KABUPATEN TORAJA UTARA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

MUSTIKA NATSIR
E 121 13 017

Telah diperbaiki
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017

Menyetujui,

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. Andi Samsu Alam.,M.Si	(.....)
Sekretaris	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si	(.....)
Anggota	: Prof. Dr. H. A. Gau Kadir,MA	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.IP M,Si	(.....)
Anggota	: A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Andi Samsu Alam.,M.Si	(.....)
Pembimbing II	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat rampung dan selesai. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembang Bangkelekila’, Kecamatan Bangkelekila’, Kabupaten Toraja Utara”**. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Proses penulisan skripsi ini berawal dari proposal penelitian hingga pengolahan data melalui usaha keras dan giat dan banyak melibatkan pihak yang sangat memberi andil besar pada penulis. Oleh karena itu, penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Alimuddin Unde M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si Selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.

4. Ibu Dr. H. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS.
5. Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para tim penguji Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si, Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA, Bapak Rahmatullah, S.Ip, M.Si, Bapak A. Lukman Irawan, S.Ip, M.Si yang banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh staff pengajar, baik dosen maupun asistennya. Staff pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
8. Kepala Lembang Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara beserta jajarannya, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis hanturkan atas bantuan dan kerja samanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Ayahanda M. Natsir dan Ibunda Debora S. Mentaruk, terima kasih atas segala doa dan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara-saudariku Fenny Jayanti Natsir, Roy Natsir, Jecklyne Trisnawati Natsir dan Rizky Natsir atas motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Sintani Dewi Sarira, Yesiana Gafriari Kobba, Eunike Elsy, dan Debby Mangetan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
12. Segenap keluarga kecil Mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 “Lebensraum” saudara seperjuangan terima kasih selama masa diperguruan tinggi selalu memberikan momen yang indah.
13. Untuk saudara-saudaraku di PMKO FISIP Unhas, terima kasih atas kebersamaan yang telah kalian berikan selama ini.
14. Kanda-kandaku dan adik-adikku dalam bingkai Orange Himapem yang selama ini berbagi kebersamaan di HIMAPEM.
15. Seluruh keluarga, rekan dan sahabat yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi penulis.

Adanya partisipasi oleh pihak tersebut diatas, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kita semua dan senantiasa tetap menyertai kita dalam langkah kehidupan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun

tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Sekian dan terima kasih.

Makassar, 26 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman sampul.....	i
Halaman pengesahan	ii
Halaman penerimaan	iii
Kata pengantar	iv
Daftar isi	viii
Daftar tabel.....	xi
Daftar gambar.....	xiii
Abstract	xiv
Abstrak	xv

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakanng	1
1.2 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian	7

BAB II Tinjauan pustaka

2.1 Konsep Analisis	9
2.2 Konsep Pembangunan.....	11
2.3 Pembangunan Desa	16
2.4 Infrastruktur Desa.....	22

2.5 Tinjauan tentang Desa	26
2.6 Tinjauan tentang Lembang.....	32
2.7 Kerangka Konsep.....	33

BAB III Metode penelitian

3.1 Lokasi dan waktu penelitian	35
3.2 Tipe penelitian.....	35
3.3 Sumber Data	36
3.4 Teknik pengumpulan data	37
3.5 Definisi operasional.....	39
3.6 Teknik analisis data.....	40

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan

4.1 Profil desa penelitian.....	42
4.2 Gambaran pemerintahan Lembang Bangkelekila'	49
4.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara	59
4.3.1 Perencanaan	64
4.3.2 Pelaksanaan.....	78
4.3.3 Pengawasan dan Pemantauan	90
4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi	92
4.4.1 Faktor pendukung.....	93
4.4.2 Faktor penghambat.....	95

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	99
Daftar pustaka	100
Lampiran	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Kerja Pemerintah Lembang Tahun 2016.....	5
Tabel 4.1 Perkembangan Legenda dan Sejarah Lembang Bangkelekila' Toraja Utara	45
Tabel 4.2 Jumlah penduduk tahun 2016	46
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan di Lembang Bangkelekila Tahun 2014 ..	47
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 4.5 Mata Pencaharian	48
Tabel 4.6 Kepemilikan Ternak	48
Tabe 4.7 Daftar gagasan dusun Sangtanete.....	71
Tabe 4.8 Daftar gagasan dusun Torodasi.....	72
Tabe 4.9 Daftar gagasan dusun Sangakropi'	73
Tabel 4.10 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Lembang Bangkelekila' tahun 2016	74
Tabel 4.11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Bangkelekila' tahun anggaran 2016	79
Tabel 4.12 Pembangunan jalan	86
Tabel 4.13 Pekerjaan Drainase.....	86

Tabel 4.14 Pekerjaan jembatan	86
Tabel 4.15 Pekerjaan Duiker	87
Tabel 4.13 Pekerjaan Gorong-Gorong	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	34
Gambar 4.1 Peta Lembang Bangkelekila'	42
Gambar 4.2 Alur/Tahapan penyusunan RKP Desa.....	65
Gambar 4.3 Alur Musyawarah Pembangunan Lembang Bangkelekila'. ..	68

ABSTRACT

Mustika Natsir, Student Number E12113017, Majority in Government Science, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University, conducts a thesis with the title An Analysis of The Implementation of Rural Area's Infrastructure Development in Lembang Bangkelekila' - Toraja Utara, under the guidance of Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si as a supervisor I and A. Murfhi, S.Sos, M.Si as supervisor II.

The purpose of this research is to know The Analysis of The Implementation of Rural Area's Infrastructure Development in Lembang Bangkelekila' - Toraja Utara along with the factors that affected it. To achieve these goals, the researcher use qualitative method in research methodology by explain the data descriptively. The data collection technique done by observation, interviews, as well as documents and archives by using qualitative descriptive in analysis techniques.

Based on the results of this research, the researcher found out that The Implementation of Rural Area's Infrastructure Development in Lembang Bangkelekila' have to be improved, as it seen from the implementation that is not transparent also the lack of coordination with local government and society involvement in the implementation of the development that has not been maximum. As for the factors that influence the implementation of rural area's infrastructure development in Lembang Bangkelekila' includes supporting and restricting factors. Supporting factors are availability of funds and the existence of participation from society. Restricting factors are the lack of coordination between the local government and government in sub-district, also the situation where weather conditions and the location itself that difficult to go through.

Keywords : Development, Infrastructure, Rural Area

ABSTRAK

Mustika Natsir, Nomor Induk Mahasiswa E12113017, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Lembang Bangkelekila' perlu untuk lebih ditingkatkan, hal tersebut dilihat dari pelaksanaannya yang tidak transparansi serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah Daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di Lembang Bangkelekila' meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni, tersedianya dana dan adanya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat yakni, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah Daerah, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung dan medan yang sulit untuk ditempuh.

Kata kunci : Pembangunan, infrastruktur, Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.¹

Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*.

¹ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, 2015, hlm 8.

Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”²

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1

Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur

keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah Lembang Bangkelekila' dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Lembang adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Lembang Bangkelekila, Kepala Lembang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Lembang Bangkelekila' masa jabatan Kepala Lembang saat ini yaitu tahun 2016-2021. Maka dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembangunan berdasarkan (RKP) tahun anggaran 2016 yang telah terlaksana.

Berdasarkan penelitian penulis, diperoleh data bahwa capaian kinerja pembangunan di Lembang Bangkelekila' masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari tidak transparansinya penggunaan anggaran oleh pemerintah Desa, serta kondisi umum

infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rencana Kerja Pemerintah Lembang Bangkelekila', Kecamatan
Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016

No	Jenis Kegiatan	Biaya dan Sumber pembiayaan		Keterangan
		Jumlah (Rp)	Sumber	
1.	Pembangunan jalan Dusun Sangatnete	93.000.000	APBD	Tidak terlaksana
2.	Pembangunan Jalan Lingkungan	185.000.000	APBD	Tidak terlaksana
3.	Ratabat Beton Jalan Sangtanete	45.000.000	APBD	Tidak terlaksana
4.	Pembukaan Jalan Dusun Sangtanete-Dusun Torodasi	194.000.000	APBD	Tidak terlaksana
5.	Pembangunan Jalan pamungkarun Dusun Sangkaropi'	137.000.000	APBD	Tidak terlaksana
6.	Bantuan Barang ke kelompok Pemuda Dusun Sangkaropi'	25.000.000	APBD	Tidak terlaksana
7.	Belanja Pembangunan Rehab saluran pemasukan air pada kawasan budidaya Ikan air tawar Managallang	100.000.000	APBD	Tidak terlaksana
8.	Lanjutan Rabat Beton Rantetallang-Sangtanete beserta talut dan drainase	159.000.000	APBD	Terlaksana
9.	Lanjutan rabat beton tetewai-Samorrion	200.000.000	APBN	Terlaksana
10.	Pengerasan jalan Maninnik-To'Batu beserta jembatan	200.000.000	APBN	Terlaksana
11.	Pengerasan jalan Sangtanete-Pebulian beserta jembatan	200.000.000	APBN	Terlaksana
12.	Pembangunan Poskedes To'Batu Dusun Sangkaropi'	300.000.000	APBN	Tidak terlaksana
13.	Pemagaran Lokasi Kantor Lembang	150.000.000	APBN	Tidak terlaksana
14.	Lanjutan Pembangunan Kantor Lembang	150.000.000	APBN	Tidak terlaksana
15.	Pembangunan Paud dan TK Bangkelekila'	300.000.000	APBN	Tidak terlaksana

Sumber Data: RKP Lembang Bangkelekila' tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa fokus pembangunan di Lembang Bangkelekila' tahun 2016 adalah infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang menjadi sarana transportasi darat utama di Lembang Bangkelekila' belum memadai. Dengan adanya pembangunan prasaranan jalan dan jembatan, Pemerintah Lembang Bangekelkila' berharap masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mempermudah kegiatan mereka sehari-hari, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah dll.

Selain itu tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 15 kegiatan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2016 hanya terlaksana 4 kegiatan, hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemerintah dalam pembangunan. Belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila', hal tersebut disebabkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Dana untuk pembangunan di Lembang Bangkelekila menggunakan dana APBN dan APBD sebesar Rp 758.010.959.

Terkait permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat . Selain itu penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah Desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah dan menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

2.1 Konsep Analisis

Analisis merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan suatu kebijakan, sebab dalam pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan tanpa adanya suatu analisis, maka tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilannya tentunya akan sangat sulit menilainya.

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³

³ <http://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 5 Desember 2016

Menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.⁴

2.1.1 Fungsi Analisis

Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu permasalahan,

analisis memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai
- b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis.
- c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan.

Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas

⁴ Sofyan Syafitri Harahap, *Analisis Krisis atau Laporan Keuangan* (Rajawali Pers, Jakarta, 2004), hlm 207.

perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.

2.2 Konsep Pembangunan

Pada lokus pemerintahan, menurut Hoogerwerf kebijakan harus dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa.⁵

Sementara substansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan pihak rakyat yang dikuasi dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.⁶

Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijakan pembangunan. Pada kebijakan pembangunan haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pembangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah.

Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam

⁵ Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, hal. 8

⁶ *Ibid* hal. 13

mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak faham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

Menurut Soetomo, pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional.⁷

Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan oleh Rogers, yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada

⁷ Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal 27

proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.⁸

2.2.1 Ciri-ciri pembangunan

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan

⁸ Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal 30

jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka

waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya.⁹

⁹ Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. hal 44-45

2.3 Pembangunan Desa

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁰

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraaannya.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.¹¹

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti

¹⁰ UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Solekhan. Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Wisma Kalimetro, Malang, 2014) hlm 46

yang dikemukakan oleh Solekhan mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.¹²

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini :

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis.

Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitiandan pendidikan yang sangat baik.

- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-

¹² Ibid

hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujuka pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
- d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan

terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama.

Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

2.3.1 Perencanaan pembangunan desa

Pelaksanaan pembangunan desa dimulai dengan tahap perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Tarigan (2009) yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:¹³

- a) Perencanaan berarti memilih
- b) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya,
- c) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,
- d) Perencanaan berorientasi masa depan

Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa

¹³ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah edisi Revisi* (Read,2009), hlm 5

sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dari gambaran tersebut menunjukan bahwa Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

2.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

2.3.3 Pengawasan Pembangunan Desa

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.4 Infrastruktur Desa

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie,2003), Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedesaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.¹⁴

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi (Grigg,1988).

¹⁴ Kodoatie R.J. 2003. *Pengantar manajemen infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 101

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial (Kodoatie, 2003).¹⁵

a. Kategori infrastruktur

Menurut Grigg, ada 6 kategori besar infrastruktur

- a) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan)
- b) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara)
- c) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk irigasi)
- d) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat)
- e) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar
- f) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas)

¹⁵ R.J Kodoatie, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur* (Pustaka Pelajar, 2003), hlm 204

b. Jenis-jenis infrastruktur

1. Infrastruktur keras (physical hard infrastructure)\

Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan dan saluran irigasi.

2. Infrastruktur keras non-fisik (non-physical hard infrastructure)

Berkaitan dengan fungsi fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi.

3. Infrastruktur lunak

Meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan).

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu :

1) Jalan Desa

- a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten).
- b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan makadam.
- c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya

menghubungkan antar satuan pemukiman atau jalan masuk ke masing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan.

2) Air bersih

Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan dan keuntungan antara lain :

- a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu
- b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil
- c. Sistem sambungan pada langganan setiap bulan dengan jumlah tetap
- d. Sistem operasional secara sederhana dan murah
- e. Kebutuhan akan tenaga tidak besar

3) Listrik

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4) Rumah

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh

masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah.

5) Irigasi

Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat, terlebih pada desa dengan sumber mata pencaharian petani.

2.5 Tinjauan tentang Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama pernah mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara seragam

dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang bentuk dan susunannya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadangkala dianggap sebagai hambatan dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.¹⁶

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,

¹⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, 2012, hlm.10

dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara operasional, Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti, bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945

membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat(2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat(7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.¹⁷ Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem pemerintahan desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan

¹⁷ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, hlm.50-52

masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.¹⁸

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Perumusan secara formal desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 43 menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.6 Tinjauan tentang Lembang

Lembang adalah pembagian wilayah administratif pada 2 kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Lembang Setara dengan sebutan Desa yakni pembagian administratif di bawah Kecamatan. Lembang dipimpin oleh kepala Lembang, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.

Pemerintah Lembang di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengatur tentang Desa. Lembang disahkan menurut Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 2 tahun 2001 Seri D Nomor 2 tentang Pemerintahan Lembang.¹⁹

2.7 Kerangka Konsep

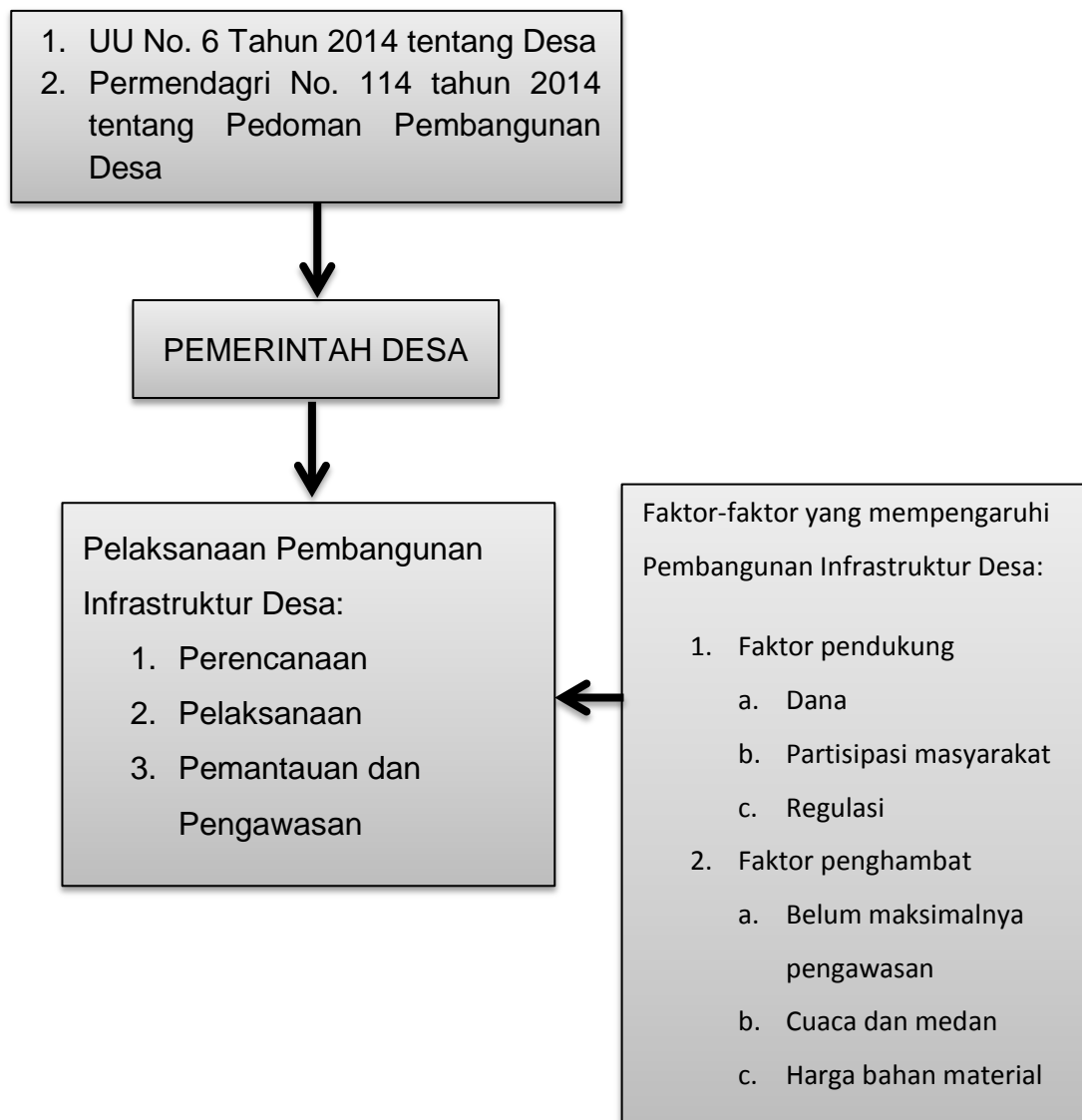
Sebagai wujud implementasi dari undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi.

¹⁹ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembang_\(Toraja\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembang_(Toraja)) diakses pada tanggal 18 mei 2017

Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Gambar 2.1

Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu di Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara, yang meliputi 3 dusun yaitu Dusun Sangtanete, Dusun Sangkaropi', dan Dusun Torodasi. Penelitian ini dilakukan selama ± 1 (satu) bulan.

3.2 Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang pelaksanaan pembangunan dalam hal ini pembangunan infrastruktur pedesaan di Lembang Bangkelekila'.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik wawancara dengan informan.

3.3 Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

- a. Kepala Bidang Pemerintahan Lembang DPML Kabupaten Toraja Utara.
- b. Kepala Lembang Bangkelekila'
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Bangkelekila'
- d. Sekretaris Lembang Bangkelekila'
- e. Kepala Dusun Sangtanete
- f. Kepala Dusun Torodasi

g. Masyarakat di Lembang Bangkelekila'

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui Library Research yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta Penelusuran data On Line atau dengan menggunakan fasilitas internet.

3.4 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperlukan berkaitan dengan objek yang diteliti, maka teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan dalam wawancara menurut perkembangan wawancara itu secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang diwawancarai. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara *depth interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

2. Observasi (pengamatan)

Selain wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dari observasi ini selain untuk menunjang data-data diatas juga untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet.

3.5 Defenisi operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- b. Pembangunan Infrastruktur Desa dimaksud berupa pelaksanaan Pembangunan dalam bidang infrastruktur Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tahun anggaran 2016 yaitu infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, duiker dan gorong-gorong, yang berdasarkan pada kebijakan yang mengatur tentang Pembangunan Desa.

Adapun Indikator Pembangunan Desa :

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksanaanya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

3. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara.

Adapun indikator faktor-faktor yang dimaksud adalah :

1. Faktor pendukung
2. Faktor penghambat

3.6 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis

dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan ditunjang oleh data kuantitatif dan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di lokasi yang telah ditentukan. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang telah diperoleh melalui observasi, dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian, serta wawancara terhadap beberapa informan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam menjawab penelitian tersebut. Adapun uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara.

4.1 Profil Desa Penelitian

4.1.1 Sejarah Lembang Bangkelekila'

Bangkelekila' terdiri dari dua kata yaitu *Bangke Le* dan *Kila'* dimana *Bangke le* dalam bahasa Toraja artinya *Luka ya* dan *Kila'* artinya *Kilat* atau *Petir*. Nama ini berasal dari nama seorang tokoh yang berkuasa sekitar abad ke 6 yang bernama ***Bangkelekila'*** dimana tokoh tersebut diberikan nama demikian oleh orang tuanya karena ketika ibu dari dari Bangkelekila' mau melahirkan, dia menderita 7 hari 7 malam kesakitan dan ketika Bangkelekila' lahir

melalui paha ibunya bukan yang semestinya dan bersamaan dengan meledaknya kilat maka ibunya berteriak bahwa bayinya lahir tapi lahir melalui pahanya sehingga sang suami berteriak dan bertanya dari kolong rumah dalam bahasa Toraja mengatakan *Bangke le* dan karena kelahiran anaknya bersamaan dengan meledaknya petir sehingga orang tuanya menamakan Bangkelekila'. Setelah Bangkelekila' dewasa dan menjadi pemberani dan berkuasa maka daerah kekuasaannya diberi nama Bangkelekila' itulah yang merupakan cikal bakal nama Lembang Bangkelekila'. Ketika Bangkelekila' meninggal dunia maka daerah kekuasaannya di bagi 6 wilayah oleh anaknya yakni :

1. Wilayah To'yasa oleh Ne' Bawapadang
2. Wilayah Akung oleh Tandung Padang, Mata Sugi', Lotong Lila, Aruttadi, Rambu Dama', Paribang, Pagiling dan Salipadang, inilah yang menjadi Tuan rumah Bangkelekila' atau menjadi cikal bakal pemekaran.
3. Wilayah Tampan oleh Tengko Kila' dan Datu Limbong.
4. Wilayah Palawa' oleh To Madao.
5. Wilayah Rantepangli oleh Ura' Padang.
6. Wilayah Malakiri oleh Palotongan atau Lotong Sugi'

Sekitar abad ke 19 wilayah tersebut diatas disatukan kembali oleh Pemerintah Belanda yang diberi nama Kampung Bangkelekila', yang diperintah oleh Runa dan ketika Runa

meninggal Kampung Bangkelekila' kembali lagi seperti tersebut di atas yaitu terbagi 6 wilayah dan ketika masuknya UU No. 9 Tahun 1965 Tentang Desa, maka Kampung To' yasa, Kampug Akung dan Tampan disatukan menjadi satu Desa yang diberi nama Lembang Sangakungan, yang dijabat oleh *Makaba* (1971-1972). Makaba meletakkan jabatan sehingga diperintah lagi oleh PT Palintin, namun pada tahun 1981 dimekarkan menjadi Lembang Sanakungan, Tampan Bonga, dan Lembang To'yasa Akung. Pada tahun 2003 Sangakungan dan Tampan Bonga digabung kembali menjadi Lembang Sangakungan yang diperintah oleh Marthen Bida kemudian tahun 2006 dimekarkan kembali menjadi dua dan Sangakungan diganti nama menjadi Lembang Bangkelekila' dan tetap dijabat oleh Marthen Bida sampai dengan tahun 2013, pada saat itu diadakan pemilihan dan yang terpilih adalah Elisabeth Tonapa Bsc sampai dengan saat ini.

Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Lembang Bangkelekila' adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perkembangan Legenda dan Sejarah Lembang Bangkelekila'

Tahun kejadian	Kejadian baik	Kejadian buruk
1942		Banyak warga yang meninggal yang dikenal dengan peristiwa "Ra'ba Biang"
1943		Busung lapar karena terjadi kemarau yang berkepanjangan
1946		Kemarau panjang
1950		Tidak ada pakaian yang menyebabkan terjadi penyakit kulit massal
1952		Terjadi penyakit cacar
1965		G30S PKI
1966	Terjadi stabilitas keamanan	
1967	Sandang pangan tersedia	
1995	Berdirinya Lembang Bangkelekila'	
2008	Berdirinya kantor Lembang Bangkelekila'	

Sumber Data: RPJM Lembang Bangkelekila' tahun 2016-2021

4.1.2 Kondisi Geografis

Lembang Bangkelekila' terletak 4 Km dari ibukota Kecamatan dan 25 Km dari Kota Rantepao yang merupakan ibukota Kabupaten Toraja Utara. Lembang Bangkelekila' mempunyai luas wilayah $\pm 4,71 \text{ Km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lembang Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lembang Bori' Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan To'yasa Akung, Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara

Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas sekitar 3.550 ha yang terbentang luas tersebar di setiap kampung. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

4.1.3 Demografi

Lembang Bangkelekila' mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.872 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk tahun 2016

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1	Kampung Sangtanete	331	268	599	116
2	Kampung Sangkaropi'	421	350	771	150
3	Kampung Torodasi	288	214	502	90
Total		1.040	831	1.872	356

Sumber Data: Profil Lembang Bangkelekila' Tahun 2016

Tabel diatas menggambarkan bahwa Lembang Bangkelekila' memiliki jumlah penduduk 1.872 Jiwa. Dengan perbandingan jiwa penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 1.040 jiwa dan

perempuan 831 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi dibandingkan penduduk perempuan.

4.1.4 Sosial Budaya

4.1.4.1 Bidang keagamaan

Penduduk Lembang Bangkelekila' keseluruhan beragama kristen yaitu Protestan dan Khatolik.

4.1.4.2 Bidang Pendidikan

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan di Lembang Bangkelekila Tahun 2014

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung Buah	Guru	Murid	Gedung Buah	Guru	Murid
1	TK	1	2	59	-	-	-
2	SD	1	9	214	-	-	-

Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat 2 jenis sarana pendidikan di Lembang Bangkelekila' yaitu 1 TK dan 1 SD. Total jumlah siswa yang ada adalah 273 siswa dan terdapat 11 guru.

Adapun tingkat pendidikan penduduk Lembang Bangkelekila' adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan

Tidak tamat SD	SD	SMP	SLTA	Sarjana
259	149	39	175	36

Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014

4.1.4.3 Bidang Ekonomi

Penduduk Lembang Bangkelekila' memiliki pekerjaan dalam bidang pertanian, perdagangan, Buruh dan PNS.

Tabel 4.5
Mata Pencaharian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
224	43	18	43

Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk Bangkelekila' bekerja sebagai petani, pedagang, PNS dan buruh. Selain pekerjaan di atas, mata pencaharian penduduk yang lain bersumber dari peternakan atau pemeliharaan hewan. Berikut jumlah kepemilikan ternak di Lembang Bangkelekila' :

Tabel 4.6
Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Lain-lain
590	-	83	-	550	310

Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2014

4.1.5 Pemerintahan

Lembang Bangkelkila menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa demokrasi yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dengan jumlah perangkat yang memadai. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya suatu program pembangunan dan penataan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerangka program kegiatan RPJM-Des dan RKPDes.

4.2 Gambaran Pemerintahan Lembang Bangkelekila'

4.2.1 Visi dan Misi

4.2.1.1 Visi

Visi pembangunan Lembang Bangkelekila' merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJP Daerah Kabupaten Toraja Utara, substansi RPJM Daerah Kabupaten Toraja Utara, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Lembang Bangkelekila' serta visi dan misi kepala Lembang terpilih. Adapun Visi Lembang Bangkelekila' yaitu *"Terwujudnya kehidupan masyarakat Lembang Bangkelekila' yang religius, aman, harmonis, maju, adil, dan tertib"*.

4.2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun Misi Lembang Bangkelkila' yaitu:

- a) Membenahi dan mengoptimalkan fungsi dan sistem pemerintahan Pemerintahan serta mendorong terciptanya sinergi antara aparat dalam wilayah pemerintaha Lembang disetiap jenjang atau tingkatan (Lembang, Kampung, RK, RW, dan RT) guna meningkatkan efektifitas kinerja segenap aparat Lembang untuk menjawab tantangan sebagai "pelayan" Masyarakat dalam memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan.
- b) Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Lembang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar

yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (RTM).

- c) Mengembangkan dan mengelolah seluruh potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya alam dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas serta pendapatan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- d) Memperkokoh pronsip-prinsip kehidupan beragama , yang bermasyarakat dan berwawasan budaya dalam rangka terciptanya tatanan sosial kemasyarakatan Lembang Bangkelekila' yang beriman, bermoral, persekutuan, saling menghormati, aman dan damai.

4.2.1.3 Arah kebijakan pembangunan Lembang Bangkelekila'

Kebijakan umum pembangunan Lembang Bangkelekila' merupakan hasil rumusan dari 4 (empat) masukan utama. *Pertama*, kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor yang mungkin menghambat proses pembangunan di masa depan. *Kedua*, *environmental input*, yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses pembangunan yang tercipta akibat dinamika lingkungan yang strategis. *Ketiga*, *instrumental input*, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam

proses pembangunan Lembang Bangkelekila'. *Keempat*, dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Lembang Bangkelekila'.

Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dan pemberdayaan kelembagaan.

Kebijakan dimaksud dijabarkan ke dalam 7(tujuh) program pembangunan yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya, sehingga secara bersama-sama diharapkan akan semakin mendekatkan Lembang Bangkelekila' kepada visi pembangunan yang dipertegas pada RPJM Lembang Bangkelekila' 2016-2021, yaitu Lembang Bangkelekila' yang memiliki Sumber Daya Manusia Yang berkualitas.

4.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini

sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa yang akan saling berkoordinasi.

4.2.2.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah Lembang Bangkelekila'

Berikut merupakan penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari Kepala Lembang dan Perangkat Lembang di Lembang Bangkelekila':

1. Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas pokok tersebut, Kepala Desa juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.

- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- q. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- r. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.

- s. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
- t. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPD.

2. Sekretaris Desa

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
- d. Merumuskan program kepada Kepala Desa.
- e. Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
- g. Penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
- j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa.
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain: RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan sosial politik lainnya.

4. Kepala Urusan Umum

- a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa, mempunyai tugas keluar serta melaksanakan kearsipan.
- b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.

- d. Melaksanakan dan mengushakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
 - f. Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
 - g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
5. Kepala Urusan Pembangunan
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa.
 - b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.
 - c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembalikan.
 - d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencata daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.
6. Bendahara Desa
- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.

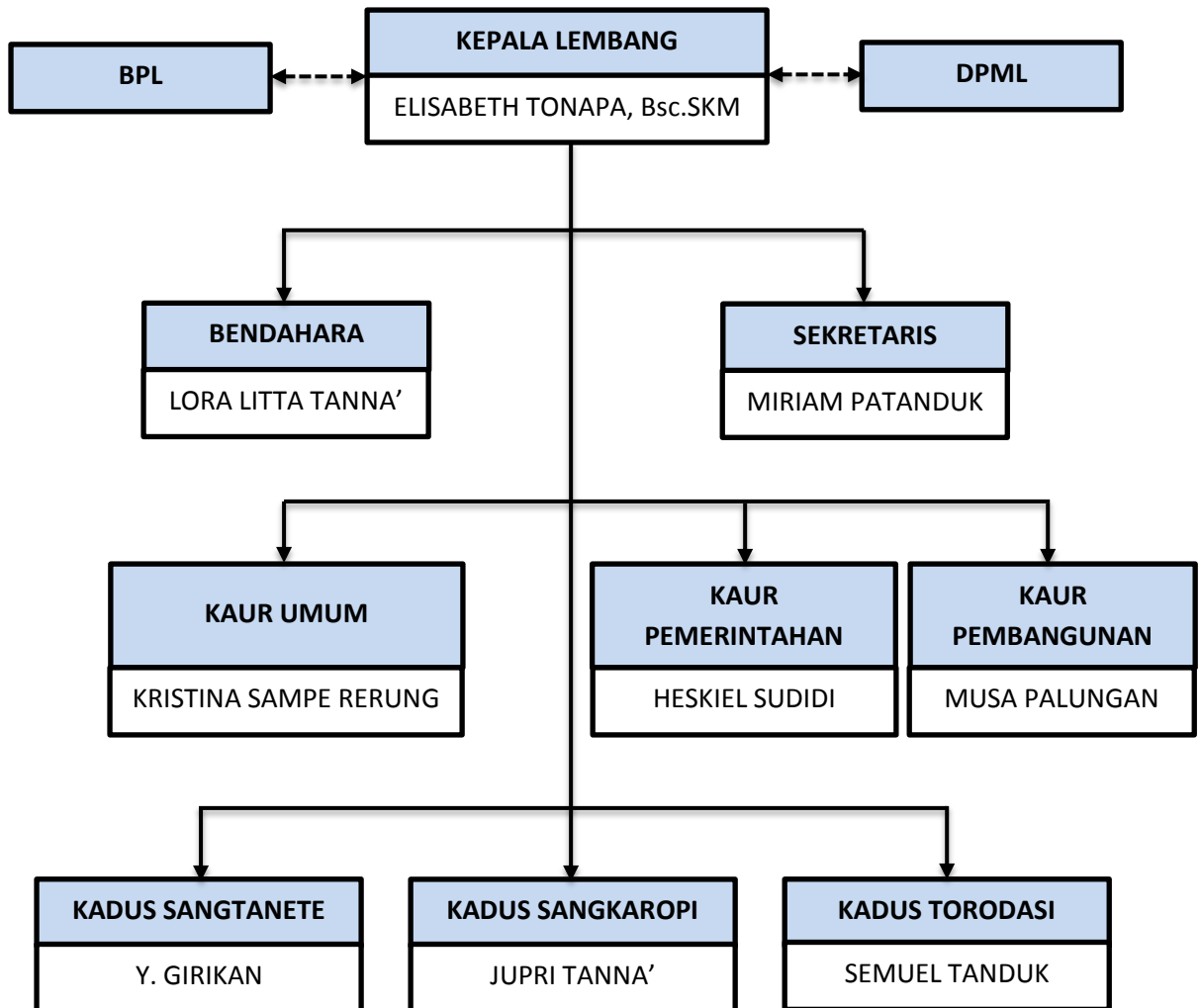
- c. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa.
- d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.
- e. Merencanakan penyusunan APBDes untuk mengkonsultasikan dengan BPD.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

7. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada di bawah dari Kepala Desa.

- a. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari Kepala Desa.
- b. Memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan.
- c. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa.
- e. Membantu kepala Desa diberbagai kegiatan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa.

Struktur Pemerintahan Lembang Bangkelelila'



4.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (*goods and service*) . Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat di Lembang Bangkelekila'. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah Lembang Bangkelekila' sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Lembang adalah di bidang infrastruktur terutama perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kepala Lembang Bangkelekila' Ibu Elisabeth Tonapa :

“Untuk pembangunan, kalau dari infrastruktur fisik seperti gedung itu cukup baik, namun ada beberapa yang rusak dan tidak memadai seperti TK dan tidak ada gedung kesehatan sehingga masyarakat kalau sakit harus ke puskesmas di (Lembang) Tampan. Yang menjadi perhatian khusus bagi kami di tahun anggaran 2016 adalah pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-hari untuk menjalankan aktifitasnya.”²⁰

Berdasarkan wawancara di atas fokus pembangunan di tahun 2016 Lembang Bangkelekila' adalah pembangunan di bidang infrastruktur yakni jalan, irigasi, dan jembatan. Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan masalah utama masyarakat di Lembang Bangkelekila' seperti di ungkapkan Ibu Salma yang merupakan masyarakat setempat:

“Kalau pembangunan yang paling di butuhkan di Kampung ini itu pasti jalan, karena sebagian besar jalan disinikan sangat rusak, juga masih banyak jalan yang berupa tanah, itu menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kadang motor yang kami gunakan untuk mengangkut padi terjebak di jalanan tanah yang lubang”²¹

²⁰ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

²¹ Hasil Wawancara 5 April 2017

Berdasarkan observasi penulis, dari keseluruhan total jalan yang ada di Lembang Bangkelekila' yakni 26,5 Km, kondisi jalan poros yang seluruhnya telah dibeton mengalami kerusakan parah, sementara jalan desa 50% berupa pengerasan jalan, 30% berupa jalan beton dengan lebar 2,5m dan 20% masih berupa tanah. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan, jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan sering kali membuat masyarakat pengendara roda dua terjatuh dan kadang membuat kendaraannya terjebak dalam lumpur, belum lagi kondisi jalan yang hanya memiliki lebar 2,5M membuat kendaraan roda empat sulit melewatinya karena jalan yang sempit ini membuat mobil tidak dapat bertemu.

Lembang Bangkelekila' memiliki beberapa program pada bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Lembang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (RTM), sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur antara Kampung, RK,RW dan RT serta jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi menggerakkan perekonomian Lembang.

2. Perbaikan jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian, perkebunan dan usaha produktif lainnya.
3. Perbaikan serta pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
4. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (irigasi Lembang).

Program-program tersebut lebih lanjut di jelaskan oleh Kepala Lembang Bangkelekila':

"Kami berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan kualitas pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dengan menjalankan program-program pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada kebutuhan utama masyarakat yakni jalan."²²

Dengan adanya pembangunan prasaranan jalan dan jembatan, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah dll. Hal tersebut senada dengan pernyataan Ibu Miryam Patanduk selaku Sekretaris Lembang Bangkelekila' :

"Peningkatan infrastruktur pedesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa."²³

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam

²² Hasil Wawancara 30 Maret 2017

²³ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan Desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Namun keterlibatan partisipasi masyarakat di Lembang Bangkelekila' masih perlu ditingkatkan, hal itu berdasar pada pernyataan Kepala Lembang Bangkelekila':

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sini masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi”²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 78, Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan atau Pengawasan. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

²⁴ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

4.3.1 Perencanaan

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

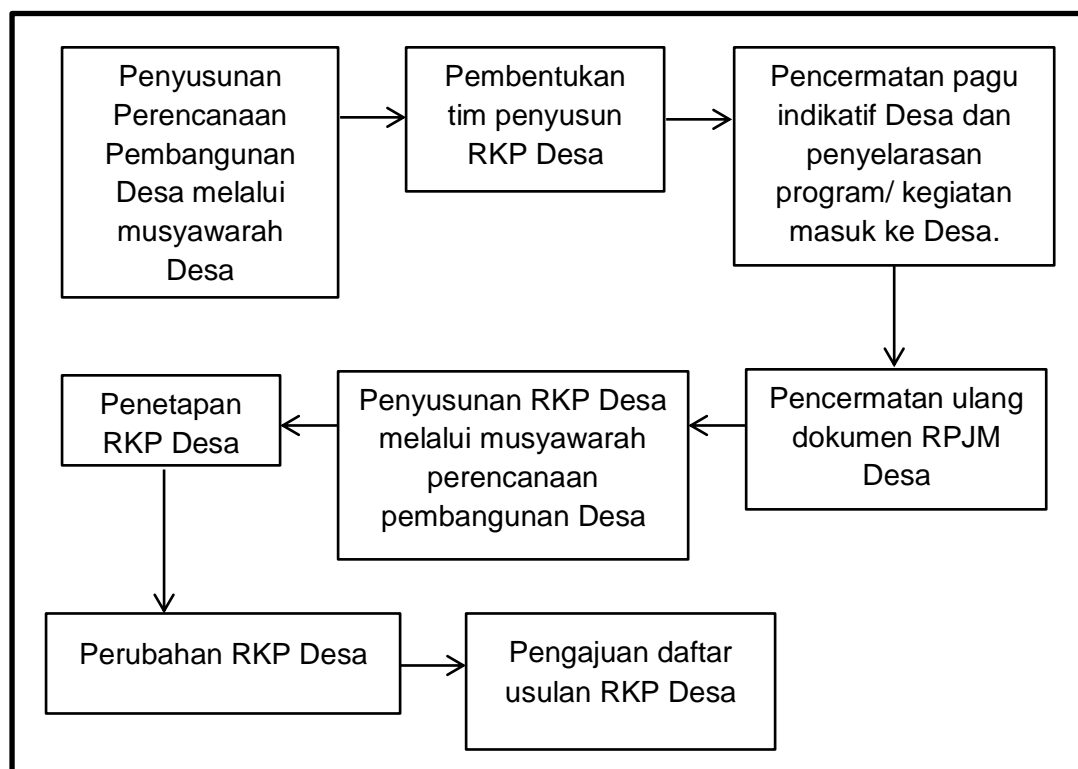
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sekretaris Lembang Bangkelekila' selaku ketua tim penyusunan RPJM Lembang dan RKP Lembang:

“Dua dokumen tersebut (RPJM Lembang dan RKP Lembang) adalah pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah”²⁵

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Lembang Bangkelekila’ masa jabatan Kepala Lembang saat ini adalah 2016-2021. Maka dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembagunan berdasarkan RKP tahun anggaran 2016 yang telah terlaksana.

Adapun alur atau tahapan dalam penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Alur/Tahapan penyusunan RKP Desa



²⁵ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

Alur/tahapan-tahapan di atas menjelaskan bahwa sebuah perencanaan harus dilakukan dengan matang melalui serangkaian tahapan-tahapan, dimulai dari Penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, kemudian membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencermatan pagu indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa. Selain itu tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa untuk 1(satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa.

Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menepakati rancangan RKP Desa. Hal senada diungkapkan Sekretaris Lembang Bangekelekila' :

“Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, dibahas dalam musrenbangLem”²⁶

Dalam proses perencanaan pembangunan di Lembang Bangekelekila', menurut Kepala Lembang Bangekelekila' mengungkapkan bahwa :

²⁶ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

“Pembangunan di sini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan penyusunan RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapannya itu kami mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapannya jelas tercantum dalam Permendagri nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa”²⁷

Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua BPL:

“Kegiatan penyusunan RKP Lembang itu sudah ada aturannya. Kami juga sudah melakukan tahapannya, semua kegiatan sudah terlampir dalam dokumennya”²⁸

Dalam penyusunan perencanaan masyarakat Lembang Bangkelekila’ bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya.

Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Seperti yang disampaikan ketua BPL bapak Yusuf Palembang :

“Dalam perencanaan masyarakat seharusnya turut aktif dalam memberikan partisipasi baik berupa ide, gagasan maupun kritik atau masukan. Hal itu dapat dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Lembang (musrenbangLem)”²⁹

Dalam prosesnya, penyelenggaraan kegiatan perencanaan desa di Lembang Bangkelekila’ merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.

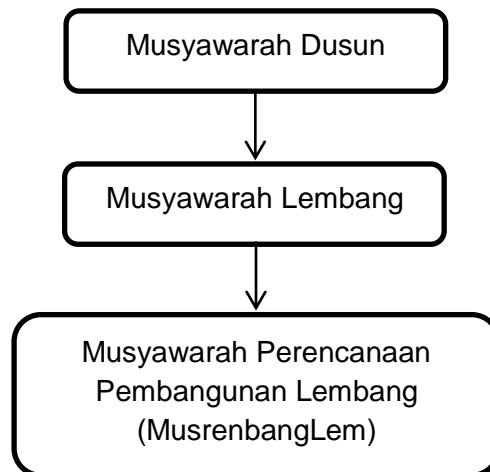
²⁷ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

²⁸ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

²⁹ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

Gambar 4.3

Alur Musyawarah Pembangunan Lembang Bangkelekila'



Pendekatan bottom-up planning dapat dilihat pada mekanisme Musyawarah yang dilaksanakan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah Lembang hingga musyawarah perencanaan pembangunan Lembang, hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Lembang Bangkelekila' :

“Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat Lembang melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah Lembang untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir pada MusrenbangLem untuk membahas rancangan serta menyepakatinya”³⁰

Model perencanaan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak dari awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakan.

³⁰ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

Perencanaan ini dilakukan dimana masyarakat berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan evaluasi program yang telah dilaksanakan, sedangkan pemerinatah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya program. Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Lembang Bangkelekila':

“Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa”³¹

Dalam tahap musyawarah Lembang dan Musyawarah rencana pembangunan Lembang di Lembang Bangkelekila' kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat.

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah Lembang masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan sekitar bulan april, kehadiran masyarakat sudah cukup baik seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Torodasi Bapak Samuel Tanduk :

“Biasanya saat musyawarah Lembang dan MusrenbangLem masyarakat yang hadir memang sedikit, tapi saat musyawarah

³¹ Hasil wawancara 30 Maret 2017

dusun dilaksanakan itu masyarakat yang hadir sekitar 20 sampai 30 orang. Jadi disitu mereka memberi masukan mengenai kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya di bawah ke musyawarah Lembang”³²

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu Bapak Yusup Bebung Pala, penyebab kurangnya partisipasi masyarakat saat musyawarah Lembang adalah cara pikirnya, dimana masyarakat menganggap bahwa kepala dusun dan beberapa masyarakat sudah cukup mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada.

“kalau musrenbangDes biasanya diikuti oleh pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari setiap dusun saja. Karena tidak mungkin seluruh masyarakat akan ikut hadir dalam rapat tersebut, apalagi masyarakat sudah memberi masukan saat musyawarah dusun, jadi perwakilan yang hadir saya rasa sudah cukup”³³

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Lembang Bangkelekila’ masih kurang baik. Masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai kebutuhan prioritas masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah dusun, namun partisipasinya dalam musyawarah Lembang masih kurang dan hanya diwakili oleh beberapa masyarakat di setiap dusun.

Adapun daftar usulan/gagasan perencanaan di tiap dusun adalah sebagai berikut:

³² Hasil wawancara 5 april 2017

³³ Hasil wawancara 4 april 2017

Tabel 4.7
Daftar gagasan dusun Sangtanete

No.	Gagasan kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Tambahan 3 RKB SDN 3 Bangekelekila'	Dusun Sangtanete
2	Mobiler (meja dan bangku siswa) SDN 3 Bangekelekila'	Dusun Sangtanete
3	Meja dan kursi guru danari kelas SDN 3 Bangekelekila'	Dusun Sangtanete
4	Fasilitas MCK SDN 3 Bangekelekila'	Dusun Sangtanete
5	Pentatutan lokasi SDN 3 Bangekelekila'	Dusun Sangtanete
6	Pengkerasan jalan masuk SDN 3 Bangekelekila	Dusun Sangtanete
7	Air bersih SDN 3 Bangekelekila'	Dusun Sangtanete
8	Pengadaan alat mainan (luncuran dan terowongan) permanen	Dusun Sangtanete
9	Pembangunan gedung TK + PAUD	Dusun Sangtanete
10	Pemagaran lokasi gedung TK	Dusun Sangtanete
11	Pengadaan perumahan dokter puskesmas	Dusun Sangtanete
12	Pembangunan gedung dental unit perawatan gigi	Dusun Sangtanete
13	Penambahan ruang rawat inap puskesmas	Dusun Sangtanete
14	Penambahan tenaga perawat puskesmas	Dusun Sangtanete
15	Penganggaran dana su-BKKBN	Dusun Sangtanete
16	Peningkatan air bersih puskesmas	Dusun Sangtanete
17	Pemagaran lokasi puskesmas permanen/semipermanen	Dusun Sangtanete
18	Penambahan tenaga tata usaha puskesmas	Dusun Sangtanete
19	Penambahan honor insentif kader-kader lembang	Dusun Sangtanete
20	Rabat beton sipa'tongan-torodasi	Dusun Sangtanete
21	Lanjutan rabat beton rantetallang-sangtanete beserta talut dan drainase	Dusun Sangtanete
22	Pengerasan jalan patongko-buyan manuk	Dusun Sangtanete
23	Rabat beton jalan sitodon-tondok banga	Dusun Sangtanete
24	Pengerasan jalan to'rea-to'sandana	Dusun Sangtanete
25	Penataan rumah adat tongkonan balalalan	Dusun Sangtanete
26	Penataan rumah adat tongkonan rura	Dusun Sangtanete

Sumber : RPJM Lembang Bangekelekila' tahun 2016-2021

Tabel 4.8
Daftar gagasan dusun Sangtanete

No.	Gagasan kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Lanjutan rabat beton tetewai-samorrón	Dusun Torodasi
2	Pengerasan jalan tombang-pararra'	Dusun Torodasi
3	Pengerasan jalan lewan-sarambu	Dusun Torodasi
4	Pengerasan jalan pabibbi-pong-dasi	Dusun Torodasi
5	Penataan rumah adat tongkonan pa'lallangan dusun torodasi	Dusun Torodasi
6	Pengembangan bibit bite'	Dusun Torodasi
7	Pengembangan bibit upe	Dusun Torodasi
8	Pengembangan kawasan ikan tawar	Dusun Torodasi
9	Pengadaan bibit ikan mas	Dusun Torodasi
10	Pengadaan bibit ikan lele jumbo	Dusun Torodasi
11	Pengadaan mesin hand traktor	Dusun Torodasi
12	Bantuan bibit, pupuk	Dusun Torodasi
13	Penangkaran benih lokal	Dusun Torodasi
14	Pengembangan tanaman manggis, alpokat	Dusun Torodasi
15	Bantuan tiang listrik	Dusun Torodasi
16	Lanjutan pemasangan listrik/ instalasi/ meteran	Dusun Torodasi
17	Lampu penerangan jalan	Dusun Torodasi
18	Fasilitas pengurusan prona	Dusun Torodasi

Sumber : RPJM Lembang Bangkelekila' tahun 2016-2021

Tabel 4.9
Daftar gagasan dusun Sangtanete

No.	Gagasan kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Pembangunan poskesdes Bnagkelekila' di dusun sangkaropi'	Dusun Sangkaropi'
2	Pengerasan jalan maninnik-to'batu beserta jembatan	Dusun Sangkaropi'
3	Pengerasan jalan parinding-to'batu beserta jembatan	Dusun Sangkaropi'
4	Rabat jalan kanan-katebang-to'kaluku	Dusun Sangkaropi'
5	Perintisan jalan galampang-ponglassi	Dusun Sangkaropi'
6	Pembangunan gedung pasar desa	Dusun Sangkaropi'
7	Pentalutan jalan longsor lokasi to'uwe dusun sangkaropi'	Dusun Sangkaropi'
8	Pengkerasan jalan batu pela'-nanna'	Dusun Sangkaropi'
9	Penataan rumah adat tongkonan buntu parinding dusun sangkaropi'	Dusun Sangkaropi'
10	Bantuan orang tua jompo dan anak cacat Lembang Bangkelekila'	Dusun Sangkaropi'
11	Bantuan renovasi rumah tidak layak huni Lembang Bangkelekila'	Dusun Sangkaropi'
12	Bantuan beasiswa anak tidak mampu Lembang Bangekelekila'	Dusun Sangkaropi'
13	Bantuan alat dekorasi karangtaruna (3 kelompok) Lembang Bangkelekila'	Dusun Sangkaropi'
14	Kelompok simpan pinjam perempuan (SPP)	Dusun Sangkaropi'
15	Bantuan kepada anak yatim piatu	Dusun Sangkaropi'

Sumber : RPJM Lembang Bangkelekila' tahun 2016-2021

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Adapun Rencana Kerja Pemerintah Lembang Bangkelekila' tahun 2016 di bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Rencana Kerja Pemerintah Lembang Bangkelekila'
tahun 2016

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber pembiayaan	
			Jumlah (Rp)	Sumber
1.	Pembangunan jalan Dusun Sangatnete	Mei-Desember	93.000.000	APBD
2.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Mei-Desember	185.000.000	APBD
3.	Ratabat Beton Jalan Sangtanete	Mei-Desember	45.000.000	APBD
4.	Pembukaan Jalan Dusun Sangtanete-Dusun Torodasi	Mei-Desember	194.000.000	APBD
5.	Pembangunan Jalan pamungkaran Dusun Sangkaropi'	Mei-Desember	137.000.000	APBD
6.	Bantuan Barang ke kelompok Pemuda Dusun Sangkaropi'	Mei-Desember	25.000.000	APBD
7.	Belanja Pembangunan Rehab saluran pemasukan air pada kawasan budidaya Ikan air tawar Managallang	Mei-Desember	100.000.000	APBD
8.	Lanjutan Rabat Beton Rantetallang-Sangtanete beserta talut dan drainase	Mei-Desember	159.000.000	APBD
9.	Lanjutan rabat beton tetewai-Samorron	Mei-Desember	200.000.000	APBN
10.	Pengerasan jalan maninnik-To'Batu beserta jembatan	Mei-Desember	200.000.000	APBN
11.	Pengerasan jalan Sangtanete-Pebulian beserta jembatan	Mei-Desember	200.000.000	APBN
12.	Pembangunan Poskedes To'Batu Dusun Sangkaropi'	Mei-Desember	300.000.000	APBN
13.	Pemagaran Lokasi Kantor Lembang	Mei-Desember	150.000.000	APBN
14.	Lanjutan Pembangunan Kantor Lembang	Mei-Desember	150.000.000	APBN
15.	Pembangunan Paud dan TK Bangkelekila'	Mei-Desember	300.000.000	APBN

Sumber data : RKP Lembang Bangkelekila' tahun 2016

Berdasarkan Tabel di atas fokus pembangunan di Lembang Bangkelekila' adalah pembangunan di bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kemajuan suatu desa guna meningkatkan aksesibilitas pembangunan di desa

sehingga dinamika ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Manfaat lainnya seperti dibidang pendidikan, kesehatan dan kearifan lokal masyarakat akan meningkat pula jika infrastruktur di pedesaan mampu dipenuhi salah satunya perbaikan jalan guna menunjang transportasi masyarakat.

Menurut Drs. Soemendar, sebagai badan yang penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengetahuan-pengetahuan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.³⁴

Fokus pembangunan di tahun 2016 yakni pembangunan infrastruktur di jelaskan oleh sekretaris Lembang Bangkelekila':

"Jadi fokus kita untuk tahun 2016 kemarin itu pembangunan fisik, terutama jalan sebagai jalur transportasi utama masyarakat, karena kondisi jalan yang selama ini kurang baik banyak menghambat kelancaran aktifitas warga berkaitan dengan pekerjaan mereka yang sebagian besar tani. Jalan yang rusak membuat warga kesulitan untuk membawa hasil pertanian mereka, jadi kami harap pembangunan ini bisa membawa dampak baik untuk masyarakat".³⁵

Perencanaan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dimana masyarakat berharap dengan perbaikan infrastruktur jalan dapat memudahkan mereka

³⁴ Soemendar. 1985. *Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan*. Seminar IPP Jakarta 30-31.

³⁵ Hasil wawancara 30 Maret 2017

untuk melakukan aktifitasnya, seperti di ungkap Bapak Yusup Bebung

Pala :

“Kebutuhan utama di kampung ini sudah pasti jalan, kondisi jalan yang sekarang sangat menghambat untuk melakukan aktifitas, apalagi saat musim hujan itu sangat sulit membawa kendaraan jadi kami terpaksa jalan kaki sampai jalan utama”.³⁶

Sebagai pemerintah atau pemimpin disuatu desa, Pemerintah harus jeli dan cepat dalam menanggapi segala permasalahan yang ada terutama masalah yang menyangkut tentang kepentingan orang banyak, karena fasilitas jalan merupakan salah satu instrumen penting yang harus dipenuhi guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan.

Setelah RKP Desa di tetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Anggaran merupakan sebuah rencana yang sistematis dengan meliputi sumber dana dan pengalokasian dana keseluruhan kegiatan atau aktifitas dalam sebuah proyek beserta waktu yang dibutuhkan dana tersebut, dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan

³⁶ Hasil wawancara 30 Maret 2017

aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain semua pembiayaan yang akan dikeluarkan dapat menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut.

Dalam menjalankan suatu rencana pembangunan, fungsi penganggaran (*budgeting*) memiliki peran yang sangat penting didalamnya. karena tanpa anggaran maka pembangunan tidak dapat berjalan.

Adapun ketentuan penggunaan dana untuk belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan :

Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai, sebab pelaksanaan

pembangunan harus mengkondisikan Dana yang tersedia. Pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Lembang Bangkelekila' :

“Pemerintah desa tidak akan mampu membiayai seluruh program-program pembangunan desa, pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi harus tersedia dana yang cukup agar pembangunannya bisa dilaksanakan secara efektif”³⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Bangkelekila' antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Lembang (PAL) dan sumber lainnya.

Berikut rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Bangkelekila' tahun anggaran 2016.

³⁷ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

Tabel 4.11
Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Bangkelekila'
tahun anggaran 2016

No	Pendapatan	Jumlah (Rp)	Sumber
1.	Pendapatan Asli Lembang	85.000.000	
	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	70.000.000	PAL
	Lain-lain Pendapatan Asli Lembang Yang Sah	15.000.000	BHR
2.	Pendapatan Transfer	1.090.872.799	
	Dana Lembang	598.176.855	APBN
	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	BHR
	Alokasi Dana Lembang	484.695.944	APBD
Jumlah Pendapatan		1.175.872.799	

Sumber data: Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Bangkelekila'

Tahun anggaran 2016 khusus untuk pembangunan infrastruktur menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD.

Infrastruktur yang didanai dari APB Lembang adalah pembangunan infrastruktur skala desa misalnya jalan desa, dan prasarana yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat desa, lingkungan pemukiman masyarakat serta prasarana pelayanan masyarakat desa.

Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala desa dan dimusyawarahkan dengan BPD. APBD terdiri atas bagian pendapatann, belanja, dan pembiayaan Desa. Sesuai dengan hasil

musyawarah antara kepala desa dan BPD, kepala desa kemudian menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan Desa.

4.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat Gotong-royong. Ada dua tahap dalam pelaksanaan pembangunan Desa yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan yaitu :

- a. Penetapan pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- b. Penyusunan rencana kerja, yaitu Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
- c. Sosialisasi kegiatan, yaitu Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi Desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi Desa.

- d. Pembekalan pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- e. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- f. Pengadaan tenaga kerja, yaitu Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- g. Pengadaan bahan/material
Tahap pelaksanaan kegiatan :
 - a. Rapat kerja pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti

tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

- b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa
- d. Pengelolaan pengaduan dan Penyelesaian masalah, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- f. Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Pertanggung Jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa, yaitu Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

Setelah penetapan RKP Desa kepala Lembang menetapkan Titus Tambing sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Lembang. Kepala Lembang menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Lembang dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Seperti yang diutarakan Kepala Lembang Bangkelekila' :

“Tentu sebelum mengerjakan kita adakan sosialisai terlebih dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan dilaksanakan. Penginformasiannya sendiri melalui sosialisasi oleh kepala dusun”³⁸

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Yusup Bebung Pala yang merupakan salah seorang warga di dusun Torodasi:

³⁸ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

“iya memang ada (informasi), kami dapat informasi tentang kegiatan pembangunan melalui sosialisasi oleh kepala dusun, disitu disampaikan kapan waktu pelaksanaannya”³⁹

Namun sosialisasi kegiatan yang dilakukan di Lembang Bangkelekila’ belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59 menjelaskan, Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Lembang Bangkelekila’ hanya sebatas penginformasian satu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada dusun yang bersangkutan. Hal tersebut diungkap oleh Bapak Yusup Bebung Pala:

“Selama ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu Cuma disampaikan ke dusun yang bersangkutan. Misalnya, waktu pembangunan jalan di dusun sangtanete itu kita warga Torodasi tidak tahu, nanti sementara dibuat baru kita tahu”⁴⁰

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Lembang Bangkelekila’ masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal Sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi Desa.

³⁹ Hasil Wawancara 4 April 2017

⁴⁰ Hasil Wawancara 4 April 2017

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi di Lembang Bangkeelkila' adalah masyarakat tidak mengetahui isi dokumen RKP Lembang dan APD Lembang. Seperti yang di utarakan Ibu Salma :

“Tidak pernah ada sosialisasi mengenai program-program yang ada di RKP Lembang, apalagi mengenai anggaran-anggaran itu tidak pernah disampaikan”⁴¹

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dusun Torodasi:

“kalau masalah anggaran itu setau saya belum pernah memang dibahas dengan masyarakat”⁴²

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana oleh Pemerintah di Lembang Bangkelekila' tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian masyarakat tampak tidak peduli dengan keadaan itu seperti yang disampaikan Bapak Yusup Bebung Pala':

“bagaimana mau transparansi kalau masyarakatnya saja tidak peduli. Pikiran masyarakat disini kebanyakan tidak mau ambil pusing dengan masalah seperti itu, jadi pemerintah gampang mengambil keuntungan dari situ”⁴³

Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan pembangunan yang transparansi harus diubah. Keadaan seperti itu akan menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain sosialisasi Kepala Lembang juga mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Lembang. Untuk pelaksana

⁴¹ Hasil Wawancara 4 April 2017

⁴² Hasil wawancara 5 April 2017

⁴³ Hasil Wawancara 4 April 2017

kegiatan harus menyiapkan dokumen administrasi kegiatan serta pengadaan tenaga kerja yang dan mahan/material dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Lembang.

Dalam tahap pelaksanaan Kegiatan, Kepala lembang tetap mengkoordinasikan tahapan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang meliputi beberapa hal seperti yang tercantum di atas.

Adapun pembangunan infrastruktur tahun 2016 yang terlaksana di Lembang bangkelekila' tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Pembangunan Jalan

No	Jenis Kegiatan	Biaya dan Sumber pembiayaan		Keterangan
		Jumlah (Rp)	Sumber	
1.	Lanjutan Rabat Beton Rantetallang-Sangtanete	106.954.818,54	APBD	Terlaksana
2.	Lanjutan rabat beton tetewai-Samorrion	188.820.700,00	APBN	Terlaksana
3.	Pengerasan jalan maninnik-To'Batu	138.236.590,87	APBN	Terlaksana
4.	Pengerasan jalan Sangtanete-Pebulian	158.829.872,36	APBN	Terlaksana

Tabel 4.13
Pekerjaan drainase

No	Jenis Kegiatan	Biaya dan Sumber pembiayaan		Keterangan
		Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Pekerjaan drainase di jalan rantetallang	39.4099.885,46	APBD	Terlaksana

Tabel 4.14
Pekerjaan jembatan

No	Jenis Kegiatan	Biaya dan Sumber pembiayaan		Keterangan
		Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Pek. Jembatan Di to'batu	50.785.867,08	APBN	Terlaksana

Tabel 4.15
Pekerjaan duiker

No	Jenis Kegiatan	Biaya dan Sumber pembiayaan		Keterangan
		Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Pek. Plat duiker maninnik-to'batu	6.781.742,05	APBN	Terlaksana
2	Pek. Duiker Sangtanete Pebulian	17.836.679,31	APBN	Terlaksana

Tabel 4.16
Pekerjaan gorong-gorong

No	Jenis Kegiatan	Biaya dan Sumber pembiayaan		Keterangan
		Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Pek. Gorong-gorong bertulang Sangtanete-Pebulian	13.438.503,33	APBN	Terlaksana

Sumber data : Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 program kegiatan pembangunan, yang terlaksana yaitu 4 kegiatan dimana rincian dari kegiatan pembangunan yang terlaksana yaitu lanjutan rabat beton di rantetallang-sangtanete beserta pekerjaan drainase (dusun Sangtanete), Lanjutan rabat beton tetewai-somorrion (dusun torodasi), Pengerasan jalan mainnik-to'batu beserta pekerjaan jembatan dan plat duiker (dusun Sangkaropi'), Pengerasan jalan Sangtanete-Pebulian beserta pembuatan duiker dan gorong-gorong bertulang (dusun Sangtanete). Meskipun telah ada bantuan Dana dari pemerintah pusat, namun anggaran untuk pembangunan ternyata tidak cukup banyak dalam membantu memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Hal tersebut terlihat dari jumlah jalan yang di beton hanya 2 lokasi dengan total panjang hanya mencapai 543,4 M dan lebar 2,5 M. Total panjang pengerasan jalan yang di kerjakan

adalah 1,173 M dengan lebar 3M, penambahan 1 buah jembatan, serta drainase drainase sepanjang 84 M.

Jumlah dana yang digunakan di bidang pembangunan adalah Rp758.010.959 dengan rincian APBN sebesar Rp 588.576.855 dan APBD sebesar Rp 152.834.104. Jumlah tersebut adalah 64,5% dari total pendapatan Lembang Bangkelekila' tahun 2016.

Pembangunan di tahun 2016 ini nyatanya tidak cukup membantu memperbaiki kondisi di Lembang Bangkelekila' khususnya bagi sarana transportasi darat masyarakat. Masih banyak jalan menuju rumah-rumah masyarakat yang berupa tanah sehingga kebanyakan dari mereka harus berjalan kaki untuk melakukan aktifitasnya. Kesulitan tersebut salah satunya di rasakan oleh Aldi warga dusun Sangkaropi':

"Iya karena masih berupa tanah, saat hujan motor tidak bisa masuk jadi di tinggal di ujung jalan dan kesini jalan kaki, kalau ke sawah juga kadang susah karena jalannya juga berupa tanah dan terkadang motor tidak bisa lewat, untuk angkut padi jadi susah"⁴⁴

Dari wawancara di atas penulis melihat pentingnya perbaikan infrastruktur terutama jalan sebagai sarana transportasi darat di Lembang Bangkelekila' agar mempermudah masyarakat melakukan pekerjaannya.

Meski pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 belum banyak mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah Lembang Bangkelkila'

⁴⁴ Hasil Wawancara oleh 4 April 2017

terus berupaya memaksimalkan pembangunannya dengan membangun serta memperbaiki secara bertahap seperti yang disampaikan Kepala Lembang :

“Tentu masih kurang, masih banyak yang harus diperbaiki jadi kita masih terus berusaha mengoptimalkan kualitas infrastruktur yang ada tentu dengan mengkondisikan keuangan yang tersedia”⁴⁵

Dari keempat pembangunan yang terlaksana di Lembang Bangkelekila’ tetap membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya, salah satunya yang dirasakan Bapak Yusup Bebung Pala:

“Bagi kami pengerasan jalan itu sudah cukup, setidaknya dengan pengerasan jalan di sini rumah kami yang jauh dari jalan poros tidak susah lagi membawa hasil panen, sekarang motor bisa lewat tidak seperti waktu masih berupa tanah”⁴⁶

Berdasarkan analisis penulis secara umum pelaksanaan pembangunan di Lembang Bangkelekila’ masih belum mengatasi permasalahan yang ada di Lembang Bangkelekila’. Pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2016 tetap memberi dampak positif bagi beberapa masyarakat yang ada. Meski demikian Pemerintah Lembang Bangkelekila’ perlu meningkatkan pembangunannya khususnya infrastruktur jalan guna membuka kelancara transportasi darat bagi masyarakat.

Hal lain yang ditemukan penulis adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana oleh Pemerintah

⁴⁵ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

⁴⁶ Hasil Wawancara 4 April 2017

Lembang setempat. Hal tersebut jika terus berlanjut dapat digunakan Pemerintah yang ada untuk mengambil tindakan yang salah.

4.3.3 Pengawasan dan pemantauan

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Secara struktural Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara :

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Salah satu pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) yang

dikemukakan oleh Bapak Agustinus L Sumule selaku ketua bidang pemerintahan Lembang:

“Metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survei, monitoring, dan evaluasi. Survei itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan sementara berjalan sekitar 50% dan Evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100%. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survei, monitoring dan evaluasi.

Dari hasil evaluasi pembangunan di Lembang Bangkelekila’ Bapak agus menyampaikan bahwa pembangunannya secara khusus telah dilaksanakan ssuai dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang ada

“pelaksanaan pembangunannya untuk tahun anggaran 2016 sudah sesuai dengan RAB yang ada”⁴⁸

Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan UU Desa tahun 2014 mengatakan bahwa pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

⁴⁷ Hasil Wawancara 8 April 2017

⁴⁸ Hasil Wawancara 8 April 2017

Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.

4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa merupakan salah satu rangkaian dasar dalam keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yaitu fungsi pembangunan (*development*). Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana

pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan. Pembangunan Infrastruktur di Lembang Bangkelekila' yang menggunakan anggaran sebesar Rp 758.010.959 yang bersumber dari APBN dan APBD dalam pengerjaannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat :

4.4.1 Faktor Pendukung

1. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila'.

Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Lembang Bangkelekila' mengungkapkan bahwa faktor utama pendukung pembangunan di Lembang Bangkelekila' adalah Dana.

Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah Lembang Bangkelekila' sejak tahun 2015, membuat pembangunan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Lembang Bangkelekila'

“Tentu faktor utamanya adalah Dana, meskipun terlihat masih kurang karena target perencanaan tidak sepenuhnya terpenuhi namun dengan bantuan dana sebenarnya sudah cukup membantu kami membangun infrastruktur disini secara bertahap”⁴⁹

2. Partisipasi masyarakat

Meskipun belum maksimal namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Lembang Bangkelekila’ merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang direncanakan.

Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Lembang Bangkelekila’:

“Faktor pendukung yang lain adalah partisipasi masyarakat, walau belum maksimal namun keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat.”⁵⁰

3. Regulasi

Terbitnya UU Desa dan Permendagri no. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi salah satu

⁴⁹ Hasil Wawancara 30 Maret 2017

⁵⁰ Hasil wawancara 30 Maret 2017

faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Lembang Bangkelekila'.

“Dengan adanya UU Desa yang memberi kewenangan pada Desa untuk membangun Desanya sendiri serta peraturan yang secara khusus memuat pedoman pembangunan Desa menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan Desa”

4.4.2 Faktor Penghambat

1. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

Hal tersebut seperti dikemukakan Kepala Dusun torodasi :

“Kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat itu menjadi salah satu faktor penghambat, karena kebiasaan seperti itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang”

2. Cuaca dan Medan

Kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Lembang Bangkelekila'. Keadaan iklim di Lembang Bangkelekila' sama dengan keadaan iklim yang ada di Toraja Utara pada umumnya yang terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba.

Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak menentu. Cuaca merupakan kendala yang tidak bisa ditebak karena setiap saat dapat berubah membuat pelaksanaan program pembangunan dapat mundur dari jadwal yang direncanakan, ditambah dengan medan yang sulit untuk dijangkau terutama saat musim hujan tiba.

“Yang menghambat itu salah satunya cuaca, karena cuaca disini tidak menentu jadi biasanya waktu pelaksanaannya menjadi tertunda dari jadwal seharusnya, ditambah lagi medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar”.⁵¹

3. Harga bahan material

Harga bahan material yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena membuat pengeluaran pembangunan tidak sesuai dengan RAB yang telah disetujui. Seperti yang diungkapkan Kepala Lembang Bangkelekila’ :

“Harga bahan yang tiba-tiba naik juga menjadi hambatan tersendiri, karena kenaikannya bisa berdampak dengan RAB yang ada”⁵²

⁵¹ Hasil wawancara 30 maret 2017

⁵² ⁵² Hasil wawancara 30 maret 2017

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan pembangunan Pedesaan di Lembang Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum pembangunan di Lembang Bangkelekila' sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila' masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami.
 - a. Dalam tahap perencanaan, pemerintah Lembang Bangkelekila' memfokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi darat masyarakat. Hal itu sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, meski belum maksimal namun terlihat partisipasi masyarakat sudah cukup baik dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah mulai dari musyawarah dusun, musyawarah Lembang hingga Musyawarah perencanaan pembangunan Lembang.

- b. Pada tahun anggaran 2016 pembangunan yang terlaksana hanya 4 program yang dikondisikan dengan dana yang tersedia. Dalam tahap ini pelaksanaan partisipasi masyarakat masih kurang, yang ikut berpartisipasi hanya sebagian masyarakat yang digaji untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Selain itu dalam pelaksanaannya pemerintah Desa tidak transparansi dalam penggunaan dana selama pembangunan, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk berbuat curang.
 - c. Dalam pengawasan dan pembangunan Pemerintah Daerah sudah melakukan pengawasan terhadap pemerintah Lembang Bangkelekila' namun pengawasan yang dilakukan masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lembang Bangkeleila' adalah :
- a. Faktor pendukung, yaitu segala hal yang membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila' adalah Dana dan partisipasi masyarakat, dan regulasi yang ada.
 - b. Faktor penghambat yaitu segala hal yang menghalangi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila' adalah, belum maksimalnya pengawasan yang

dilakukan oleh masyarakat, cuaca dan medan, serta harga bahan material yang tidak menentu.

5.2 Saran

1. Lebih memaksimalkan pembangunan khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi permasalahan utama masyarakat di Lembang Bangkelekila'.
2. Pengoptimalan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan unsur masyarakat setempat.
3. Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana untuk keperluan pemerintahan Lembang, agar tidak menjadi peluang bagi pemerintah Lembang untuk melakukan penyelewengan dana.

Daftar Pustaka

Buku – buku :

- Ali, Faried, Samsu Alam dan Sastro M.Wantu. 2012. *Studi Analisa*
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Arthur, W Lewis dalam Sjafrizal. 1965. *Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pekerjaan umum. 2008. *Pedoman Teknis Program Pembangunan Ifrastruktur Pedesaan*
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kodoatie R.J. 2003. *Pengantar manajemen infrastruktur*. Yokyakrta: Pustaka Pelajar
- Kodoatie, R. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kuncoro, Mudradjad. 2004. *Otononomi dan pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mansyur, Radjab., 2014, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jurusan Sosiologi FISIP Unhas.

- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Solekhan. Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Wisma Kalimetro
- Taringan, Robinson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah edisi Revisi*

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*

Sumber Internet :

[http://academia.edu/10042080/Pembangunan Infrastruktur Desa](http://academia.edu/10042080/Pembangunan_Infrastruktur_Desa) diakses pada tanggal 5 Desember 2016

<http://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 5 Desember 2016

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembang_\(Toraja\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembang_(Toraja)) diakses pada tanggal 18 mei 2017

LAMPIRAN

LANJUTAN RABAT BETON RANTETALLANG-SANGTANETE



Sebelum



Sesudah

DRAINASE



PENGERASAN JALAN MANINNIK-TO'BATU



LANJUTAN RABAT BETON TETEWAI-SOMORRON



PENGERASAN JALAN SANGTANETE-PEBULIAN



Sebelum



Sesudah

DUIKER



GORONG-GORONG



KONDISI UMUM JALAN DI LEMBANG BANGKELEKILA'





KONDISI INFRASTRUKTUR DI LEMBANG BANGKELEKILA'



Kantor Lembang Bangkelekila'



Gereja



Posyandu



TK



SD

DOKUMENTASI WAWANCARA



DPML Ketua bidang Pemerintahan Lembang



Bersama perangkat Lembang Bangkelekila'



Ketua BPL



Kepala Lembang



Kepala Dusun Torodasi



Masyarakat



Masyarakat

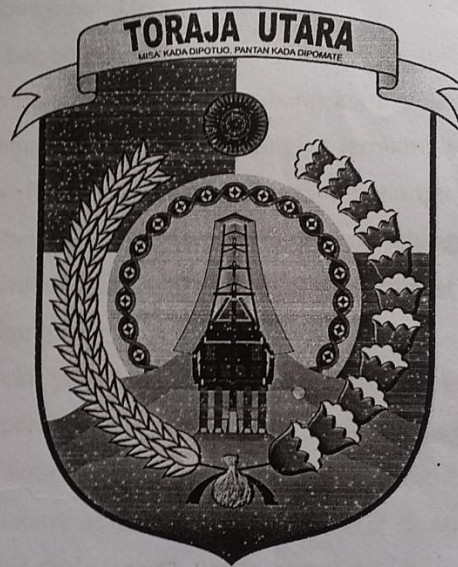


NASKAH

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN LEMBANG

(RKP Lembang)

TAHUN 2016



LEMBANG : BANGKELEKILA'

KECAMATAN : BANGKELEKILA'

KABUPATEN : TORAJA UTARA



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN BANGKELEKILA'
LEMBANG BANGKELEKILA'**

**PERATURAN LEMBANG BANGKELEKILA'
NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH LEMBANG
(RKP-LEMBANG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBANG BANGKELEKILA'

menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan RKP Lembang perlu dibuat peraturan Lembang yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Lembang dalam satu tahun yang mengacu pada RPJM Lembang;
b. bahwa untuk menetapkan RKP-Lembang sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan Lembang;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala Lembang;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan

RKP Lembang Bangkelekila' 2016

- Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558). Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2015, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2016, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Lembang Bangkelekila'. Nomor 3 TAHUN 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang Bangkelekila' 2016-2021 (Diundangkan di Lembang Bangkelekila' pada tanggal 29 Juni 2015, Lembar Lembang Bangkelekila' Tahun 2015 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG BANGKELEKILA'
dan
KEPALA LEMBANG BANGKELEKILA'

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN LEMBANG BANGKELEKILA' TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH LEMBANG (RKP) LEMBANG
BANGKELEKILA' 2016 - 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Lembang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kewenangan Lembang adalah kewenangan yang dimiliki oleh Lembang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, Pelaksanaan Pemangunan Lembang, Pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Lembang.
- (3) Pemerintahan Lembang adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
- (5) Badan Permusyawaratan Lembang yang disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerinyahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (6) Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan usnur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Lembang adalah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPL bersama Kepala Lembang
- (4) Peraturan Kepala Lembang adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang yang bersifat mengatur dalam rangka

RKP Lembang Bangkelekila' 2016

- melaksanakan Peraturan Lembang dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Keputusan Kepala Lembang adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Lembang maupun Peraturan Kepala Lembang.
 - (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang yang selanjutnya disingkat RPJM Lembang adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Lembang, arah kebijakan keuangan Lembang, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayah, disertai dengan rencana kerja.
 - (7) Rencana Kerja Pembangunan Lembang yang selanjutnya disingkat RKP- Lembang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Lembang yang memuat rancangan kerangka ekonomi Lembang, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Lembang, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Lembang maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - (8) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Lembang yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Lembang dalam memberdayakan masyarakat.
 - (9) Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
 - (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah lembang.
 - (11) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten yang dibiayai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan lembang, Pelaksanaan Pembangunan Lembang, Pembinaan Kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (12) Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disebut ADL adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (13) Lembaga Kemasyarajatn Lembang atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah lembang dalam memberdayaakn Lembang.
 - (14) Lembaga Adat adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli lembang yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP LEMBANG
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP Lembang) diajukan oleh Pemerintah Lembang
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM Lembang, pemerintah Lembang harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang di wadahi oleh LPM/LKMD.
- (3) Rancangan RPJM Lembang disampaikan kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lembang (Musrenbang Lembang).
- (4) Setelah dilakukan Musrenbang Lembang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 maka pemerintah Lembang menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPL dan pemerintah Lembang serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan persetujuan BPL atas rancangan RRPK Lembang menjadi RKP Lembang yang dituangkan dalam Peraturan Lembang.
- (5) Setelah mendapat persetujuan BPL maka Kepala Lembang menetapkan RKP Lembang melalui Peraturan Lembang serta memerintahkan Sekretaris Lembang atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Lembang.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-LEMBANG
Pasal 3

- (1) Pemerintah Lembang wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Lembang dalam perencanaan pembangunan Lembang berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hal-hal lain yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Lembang ini akan diatur dengan ketentuan dan peraturan tersendiri.

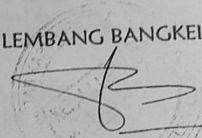
Pasal 5

RKP Lembang Bangkelekila' 2016

Peraturan Lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Lembang ini dengan penempatannya dalam berita daerah Lembang.

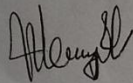
Ditetapkan di Lembang Bangkelekila'
pada tanggal ..11.....Juni 2015

KEPALA LEMBANG BANGKELEKILA'



(Elisabeth Tonapa, Bsc.SKM)

Diundangkan di Bangkelekila'
pada tanggal ..2...Juli 2015
Sekretaris Lembang.



Miryam Paranduk

Lembar Lembang bangkelekila' Tahun 2015 Nomor 3

LAMPIRAN : DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RKP LEMBANG BANGKELEKILA'
KECAMATAN BANGKELEKILA'
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2016

No	N A M A	PENDIDI KAN	JABATAN	KETERA NGAN
1	2	3	4	5
1.	ELISABETH TONAPA, Bsc. SKM	Pembina	Kepala Lembang	
2.	MIRYAM PARANDUK	Ketua	Sekretris lembang	
3.	YOHAN RINDING SUDIDI	Sekretaris	LPM/LKMD/LSM	
4.	ZET PANOTO, S.Pd	Anggota	KPMD	
5.	HERMIN P DATUWALI	Anggota	KPMD	
6.	SEMUEL NIPI' LOBO'	Anggota	LPM/LKMD/LSM	
7.	ARIS SALU SUDIDI	Anggota	LPM/LKMD/LSM	
8.	Y GIRIKAN	Anggota	KADUS	
9.	SEMUEL TANDUK	Anggota	KADUS	
10	JUPRI TANA'	Anggota	KADUS	
11	KRISTINA SAMPE	Anggota	STAP LEMBANG	

Bangkelekila',, Juni 2015

Kepala Lembang Bangkelekila'

(ELISABETH TONAPA, Bsc. SKM)

RKP Lembang Bangkelekila' 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara. Dokumen RPJM Desa wajib dibuat oleh Pemerintah Lembang yang telah melakukan pemilihan Kepala Lembang secara langsung dalam rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan desa. RPJM Lembang Bangkelekila' periode 2016-2021 disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan Program Kepala Lembang terpilih, serta perkembangan aspirasi masyarakat Lembang Bangkelekila'

RPJM Desa ini bukan hanya merupakan penjabaran ke dalam program-program pembangunan sektor yang akan dilakukan oleh Pemerintah Lembang Bangkelekila' saja, tetapi juga merupakan program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Lembang Bangkelekila', Artinya, RPJM Desa ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan

BAB I PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara. Dokumen RPJM Desa wajib dibuat oleh Pemerintah Lembang yang telah melakukan pemilihan Kepala Lembang secara langsung dalam rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan desa. RPJM Lembang Bangkelekila' periode 2016-2021 disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan Program Kepala Lembang terpilih, serta perkembangan aspirasi masyarakat Lembang Bangkelekila'.

RPJM Desa ini bukan hanya merupakan penjabaran ke dalam program-program pembangunan sektor yang akan dilakukan oleh Pemerintah Lembang Bangkelekila' saja, tetapi juga merupakan program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Lembang Bangkelekila', Artinya, RPJM Desa ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan

masyarakat di Lembang Bangkelekila' dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam jangka waktu Enam tahun ke depan.

RPJM Lembang ini menjadi satu-satunya acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Lembang (RKP Lembang) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Bangkelekila' sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam kerangka mencapai Visi dan Misi Lembang Bangkelekila'

RKP Lembang adalah Rencana Kerja Pembangunan Lembang yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Lembang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Lembang merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Lembang tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum RKP Lembang Bangkelekila' tahun 2016 terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558). Sebagaimana telah diubah Peraturan Perintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Diundangkan di Jakrta pada tanggal 30 Januari 2015, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2016, Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 – 2030 (Lembar Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4);

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Lembang (RKP Lembang) adalah :

1. Menjabarkan RPJM Lembang dalam perencanaan periode 1 (satu) tahun
2. Agar Lembang memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Lembang
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Lembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APB Lembang).

Sedangkan manfaat daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Lembang (RKP Lembang) adalah :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Lembang
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Lembang
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Lembang
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan dan dipadukan dengan program pembangunan Lembang
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 – 2030 (Lembar Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4);

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Lembang (RKP Lembang) adalah :

1. Menjabarkan RPJM Lembang dalam perencanaan periode 1 (satu) tahun
2. Agar Lembang memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Lembang
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Lembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APB Lembang).

Sedangkan manfaat daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Lembang (RKP Lembang) adalah :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Lembang
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Lembang
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Lembang
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan dan dipadukan dengan program pembangunan Lembang
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

D. Visi & Misi Desa

4.1.1 Visi

Visi Pembangunan Lembang Bangkelekila' merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Toraja Utara, substansi RPJMD Kabupaten Toraja Utara, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Lembang Bangkelekila', serta visi dan misi Kepala Lembang terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Lembang Bangkelekila' untuk 6 tahun pertama RPJM Lembang 2016-2021 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT LEMBANG
BANGKELEKILA' YANG RELIGIUS, AMAN, HARMONIS,
MAJU, ADIL DAN TERTIB ”**

4.1.2 Misi

Lembang Bangkelekila' mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

A. PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN LEMBANG

Membenahi dan mengoptimalkan fungsi dan sistem Pemerintahan serta mendorong terciptanya sinergi antara aparat dalam wilayah Pemerintahan Lembang disetiap jenjang atau tingkatan (Lembang, Kampung, RK, RW dan RT) guna meningkatkan efektifitas kinerja segenap aparat Lembang untuk menjawab tantangan sebagai “Pelayan” Masyarakat dalam memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan.

Program :

1. Pembangunan Kantor Lembang serta fungsi organisasi Pemerintah dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya aparat Lembang dan keuangan Lembang.
2. Pembenahan Administrasi Pemerintah Lembang.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Lembang melalui pelatihan dan Pendidikan.
4. Pemutahiran Data base Lembang yang meliputi tapal batas, geografi, demokrasi, potensi wilayah, propel Lembang, dan peta social Lembang.
5. Pembenahan sistem Pelayanan di Masyarakat.
6. Pemantapan dan Penguatan Badan Usaha dalam Masyarakat.
7. Pemantapan dan Penguatan badan usaha ekonomi masyarakat Lembang melalui BUM Desa

B. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT.

Mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur Lembang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (RTM).

Program :

1. Pembangunan infrastuktur antara Kampung, RK,RW dan RT serta sarana Jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi menggerakkan perekonomian Lembang.
2. Perbaikan jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian, perkebunan dan usaha produktif lainnya.

3. Perbaikan serta Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi.
4. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (~~Trigai Lembang~~).
5. Pengembangan pertanian tanaman pangan.
6. Peningkatan ketrampilan produktif bagi generasi muda.
7. Pengembalian laju pertumbuhan penduduk melalui hubungan keluarga berencana.

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Mengembangkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya alam dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Program :

1. Pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar yang sesuai wilayah berdasarkan komoditas unggulan dan kelayakan teknologi dalam rangka pengembangan wilayah ekonomi pertanian.
2. Pengembangan ekonomi berbasis pengentasan kemiskinan melalui pengembangan koperasi berbasis masyarakat.
3. Mendorong Pemerintah untuk usaha produktif masyarakat melalui program yang berbasis pemberdayaan dengan sistem kredit lunak dan atau dana bergulir.
4. Pembinaan dan penguatan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani.
5. Mempasilitasi pengadaan/wirusaha mandiri dan pengembangan usaha produktif bagi pemuda – pemudi putus sekolah.
6. Perlindungan sumber-sumber mata air.

3. Perbaikan serta Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi.
4. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (~~irigai~~ irigasi ~~lembang~~).
5. Pengembangan pertanian tanaman pangan.
6. Peningkatan ketrampilan produktif bagi generasi mudah.
7. Pengembalian laju pertumbuhan penduduk melalui hubungan keluarga berencana.

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Mengembangkan dan mengelolah seluruh potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya alam dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas serta pendapatan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Program :

1. Pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar yang sesuai wilayah berdasarkan komoditas unggulan dan kelayakan teknologi dalam rangka pengembangan wilayah ekonomi pertanian.
2. Pengembangan ekonomi berbasis pengentasan kemiskinan melalui pengembangan koperasi berbasis masyarakat.
3. Mendorong Pemerintah untuk usaha produktif masyarakat melalui program yang berbasis pemberdayaan dengan sistem kredit lunak dan atau dana bergulir.
4. Pembinaan dan penguatan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani.
5. Mempasilitasi pengadaan/wirusaha mandiri dan pengembangan usaha produktif bagi pemuda – pemudi putus sekolah.
6. Perlindungan sumber-sumber mata air.

D. KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA.

Memperkokoh prinsip-prinsip kehidupan beragama, dan bermasyarakat yang berwawasan budaya dalam rangka terciptanya tatanan social kemasyarakatan Lembang Bangkelekila' yang beriman, bermoral, persekutuan, saling menghormati, aman dan damai.

Program :

1. Mendorong peningkatan kualitas dan pasilitas tempat peribadahan.
2. Pemantapan dan penguatan forum antara umat beragama dan kepercayaan serta kehidupan beragama.
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan sarana olah Raga dan seni bagi generasi mudah serta pencegahan/penanggulangan kenakalan remaja.
4. Program keluarga sadar hukum.
5. Program penguatan institusi dan peningkatan peran, pemuka agama tokoh masyarakat, organisasi Pemuda dan lainnya. Hubungan kemitraan yang harmois daam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Lembang

Kebijakan umum pembangunan Lembang Bangkelekila' merupakan hasil rumusan dari 4 (empat) masukan utama. *Pertama*, kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor yang mungkin menghambat proses pembangunan di masa depan. *Kedua*, *environmental input*, yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses pembangunan yang tercipta akibat dinamika lingkungan strategis. *Ketiga*, *instrumental input*, yaitu berupa peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam proses

input, yaitu berupa peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam proses pembangunan Lembang Bangkelekila' *Keempat*, dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Lembang Bangkelekila'

Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dan pemberdayaan kelembagaan.

Kebijakan dimaksud dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program pembangunan yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya, sehingga secara bersama-sama diharapkan akan semakin mendekatkan Lembang Bangkelekila' kepada visi pembangunan yang dipertegas pada RPJM Lembang Bangkelekila' 2016 - 2021, yaitu Mewujudkan Lembang Bangkelekila' yang *memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas*

RPJM Lembang dijabarkan dalam RKPDes tahunan yang dirumuskan dalam Surat Keputusan Kepala Lembang, dan APBL tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

4.2.2 Program Pembangunan Lembang

Tujuan pembangunan jangka menengah Lembang merupakan perwujudan melalui upaya pencapaian tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Lembang Bangkelekila' Untuk mencapai hal tersebut, maka disusun rancangan program dan kegiatan yang sifatnya indikatif yang terbagi kedalam 7 (tujuh) program dan beberapa

rencana kegiatan yang saling terkait dan saling mendukung satu dengan lainnya.

A. Program dan Kegiatan Enam Tahun

Program dan Kegiatan rencana pembangunan jangka menengah Lembang Bangkelekila' 2016 – 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan pendidikan menuju Lembang Bangkelekila' yang Memiliki Sumber Daya yang berkualitas, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberantasan buta huruf.
 - b. Pengembangan budaya baca dan ketersediaan perpustakaan Lembang.
 - c. Promosi Pendidikan dan bea siswa.
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan TK s/d SMP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Pembangunan kesehatan menuju Lembang Bangkelekila' yang sehat, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
 - c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - d. Pengadaan jamban sehat bagi keluarga miskin.
 - e. Tersedianya lapangan olahraga umum.

3. Pembangunan ekonomi menuju Lembang Bangkelele' yang sejahtera, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan produksi pertanian tanaman padi dan palawija.
 - b. Pengembangan ternak kerbau belang
 - c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan termasuk jalanan usaha tani.
 - d. Penciptaan dan pengembangan kewirausahaan.
 - e. Peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - f. Penanggulangan korban bencana dan korban kondisi darurat.
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian berupa pasar Lembang.
5. Penguatan kehidupan sosial, budaya, demokrasi, dan kemasyarakatan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Perencanaan dan pengendalian penataan ruang.
 - b. Pengembangan budaya lokal.
 - c. Pembinaan kesadaran berpolitik.
 - d. Pembinaan dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - e. Gerakan penghijauan Lembang dan pemeliharaan.
 - f. Bantuan sosial kemasyarakatan.
6. Penguatan kelembagaan masyarakat, meliputi kegiatan :
- a. Pemberdayaan kelompok perempuan.
 - b. Pemberdayaan kelompok tani.
 - c. Pemberdayaan pemuda dan olahraga.
 - d. Pemberdayaan kader-kader pembangunan Lembang.
 - e. Pemberdayaan kelompok profesi lainnya yang ada di Lembang.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran lembaga pemberdayaan.
- 7. Penguatan kelembagaan pemerintahan Lembang menuju lembang Bangkelekila' sebagai Lembang terbaik di Sulawesi Selatan, meliputi kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah Lembang.
 - b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan asset Lembang.
 - c. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan Lembang.
 - d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota BPL.
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran BPL.
 - f. Pembentukan BUMDes dan memaksimalkan peranannya.
- B. Matriks Program Pembangunan Enam Tahunan dan Tahunan RPJM Lembang

Matriks program secara lengkap dapat dilihat pada tabel Lampiran 1.1 (Tabel Program Lima Tahunan RPJM Lembang) dan tabel Lampiran 1.2 (Tabel Program Tahunan RKPDes)

4.2.3 Strategi Pencapaian

A. Pola Penyelenggaraan

1. Program Indikatif pada tahun 2016-2021 ditetapkan melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program pembangunan;
2. Sasaran RPJM Des Lembang Bangkelekila' Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Lembang Bangkelekila' Dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Lembang, dan para Kepala Urusan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dan para Kepala Kampung, serta Kader-kader pembangunan Lembang atas pengawasan BPL.

3. RPJM Lembang akan digunakan sebagai satu-satunya acuan dalam menyusun RK Lembang dan penyusunan APBL Lembang 'Bangkelekila' ; sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Lembang dan PP 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
4. Penguatan peran stakeholder/pelaku pelaksanaan RPJM Lembang dalam upaya pencapaian sasaran yang dilakukan melalui program indikatif yang akan dijabarkan dalam berbagai kegiatan dengan pembiayaan dari APB Lembang dan sumber pembiayaan lainnya (APBD Kab./ APBD Prov. / APBN / Swadaya);

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN LEMBANG

A. Pendapatan Lembang

Pendapatan Lembang dimaksud meliputi semua pendapatan Lembang yang terdiri dari : Pendapatan asli Lembang (PAL), Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Lembang (ADL), Dana Lembang (DL), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lainnya, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Lembang dan APBD Lembang Tahun 2016 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2015.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APB Lembang

- Terbangunnya jalan di dusun Sangkaropi' dan Dusun Sangtanete

B. Berdasarkan RPJM Lembang

Berdasarkan peraturan Lembang Bangkelekila' Nomor 03 Tahun 2015 tentang RPJM Lembang Bangkelekila', pada Tahun 2016 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi : Pembangunan jalan umum, rabat beton pada beberapa dusun yang paling menLembang dan sangat dibutuhkan.

C. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah Lembang dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah Lembang yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Lembang.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN LEMBANG

Prioritas kebijakan pembangunan Lembang Bangkelekila' yang disusun dalam RKP Lembang Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana terdapat pada rumusan masalah diatas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 nantinya benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka penanggulangan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, baik urusan wajib maupun urusan pilihan seperti : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana prasarana, pertanian, perkebunan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Lembang secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Lembang

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan lembang Bangkelekila' secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Lembang

Prioritas program pembangunan skala Lembang merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Lembang. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Lembang, kewenangan Lembang dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya pendukung.

Adapun program dan kegiatan pembangunan Lembang Bangkelekila' pada tahun 2016 sesuai kemampuan skala Lembang terlampir pada lampiran RKP Lembang matrik usulan Lembang.

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Lembang Bangkelekila' tetapi pemerintah Lembang tidak mampu melaksanakan.

Hal tersebut disebabkan secara peraturan perundangan bukan kewenangan Lembang. Kedua secara pembiayaan, Lembang tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar. Ketiga secara sumber daya, di lembang tidak tersedia di Lembang baik sumber daya manusia maupun prasarana pendukung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) oleh delegasi/tim Lembang Bangkelekila' yang telah dipilih

pada saat Musrenbang Lembang dan terlampir dalam Berita Acara musyawarah.

Adapun program dan kegiatan pembangunan Lembang Bangkelekila' pada tahun 2011 yang tidak mampu dibiayai dengan kemampuan Lembang juga terlampir pada lampiran RKP Lembang matriks usulan Lembang.

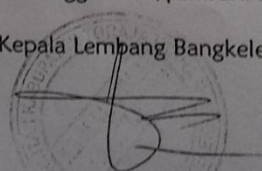
BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Lembang pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Lembang saling bekerjasama bahu membahu membangun Lembang. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Lembang. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Harapannya proses penyusunan RKP Lembang yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan skala Lembang menuju kemandirian Lembang. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat Lembang, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Lembang dapat teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Bangkelekila'
Pada tanggal : ...11.....Juni 2015

Kepala Lembang Bangkelekila'



(Elisabeth Tonapa Bsc, SKM)

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN KECAMATAN BANGKELEKILA'
LEMBANG BANGKELEKILA'

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP LEMBANG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Lembang, di Lembang Bangkelekila'
Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada :

Hari dan Tanggal : SELASA, 4 AGUSTUS 2015
Jam : 09.00
Tempat : KANTOR LEMBANG BANGKELEKILA'

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Lembang oleh tim penyusun RKP Lembang
sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Lembang adalah
sebagai berikut :

- 1 Evaluasi pelaksanaan RKP Lembang Tahun sebelumnya
- 2 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Lembang
- 3 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Lembang
- 4 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Lembang sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkelekila', 4 AGUSTUS 2015

Kepala Lembang Bangkelekila'

(Elisabeth Tonapa, Bsc. SKM.)

Ketua Tim Penyusun RKP Lembang

(Miryam Paranduk)

Wakil Masyarakat

(ESTER BOUDANICA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH LEMBANG (RKP-LEMBANG)
TAHUN : 2016

LEMBANG : BANGKELEKILA'
KECAMATAN : BANGKELEKILA'
KABUPATEN : TORAJA UTARA
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No		Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksa na Kegiatan
		Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
Penyelenggara n Pemerintahan Lembang	a	Belanja Pegawai	Penghasilan Tetap, Operasional, Pemerintah Lembang dan Tunjangan	Bangkelekil a'		Terperuhinya penghasilan Kalem	Januari- Desember	Rp	322.561.840	ADL/APBD				
								Rp	202.896.000	ADL/APBD	√			
								Rp	138.240.000		√			
								Rp	30.456.000		√			
	3	Penghasilan tetap BPL	Bangkelekil a'		Terperuhinya penghasilan BPL			Rp	33.000.000		√			
								Rp	1.200.000		√			
								Rp	119.665.840	ADL/APBD				
								Rp	51.153.195		√			
	2	Alat Tulis Kantor	Bangkelekil a'	LS		Terperuhinya BPJS kepala lembang	Januari- Desember	Rp	20.000.000		√			
								Rp	10.000.000		√			

Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang

